

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020 - 2024**



Pangkal Pinang, September 2021

**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

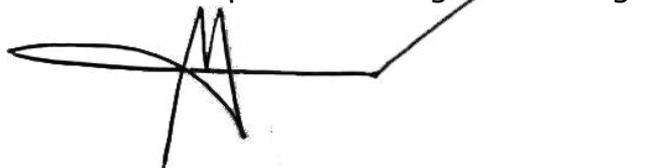
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2020–2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa setiap unit kerja Vertikal baik BNN Provinsi maupun BNN Kab/Kota harus menyusun dan menetapkan Rencana Program Kerja BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota Tahun 2020–2024.

Dengan ditetapkannya Renstra BNN Tahun 2020–2024, maka BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Renproja Tahun 2020–2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program P4GN dan program dukungan manajemen yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BNN Kab/Kota Jajaran.

Demikian Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha kita semua amin.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

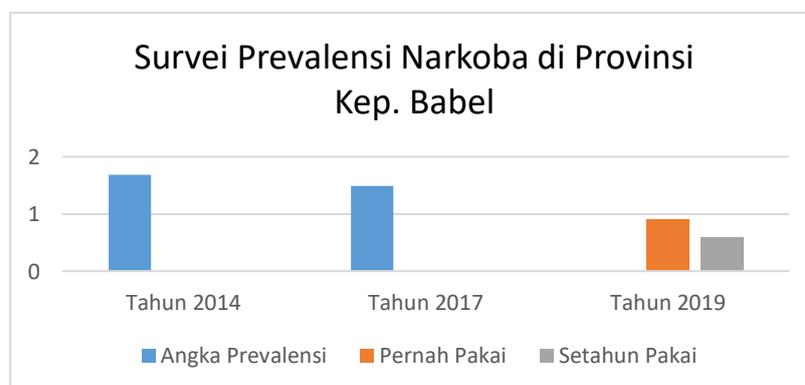


M.Z. Muttaqien, S.I.K., S.H., M.A.P

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan Program P4GN di Kepulauan Bangka Belitung dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan program P4GN di wilayah Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi input dalam menentukan rencana program kerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Tahun 2020–2024. Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut, kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan pada tahun 2014, 2017 dan 2019 diperoleh hasil sebagaimana dalam gambar berikut :



Sumber : Hasil Penelitian BNN RI dengan Puslitkes UI dan LIPI

Dari data tersebut, angka prevalensi periode 3 (tiga) tahun mengalami kecenderungan menurun, Tahun 2014 (1,68%), Tahun 2017 (1,49 %) Tahun 2019 pernah pakai (0,90%) dan setahun pakai (0,60%).

Hal ini mengindikasikan keberhasilan kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

a. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba

Capaian kinerja Pemberantasan BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan. Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P21 dan jumlah sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap dari Tahun 2018–2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	UNGKAP BP		JARINGAN TERUNGKAP	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2018	10	13	1	1
2019	8	18	1	1
2020	9	8	1	1
2021 s.d Agustus	8	13	1	1

Sumber : LKIP BNNP Kep. Bangka Belitung 2018 – 2021

b. Data penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary dan telah mendapat layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebanyak 81 orang, tahun 2019 sebanyak 9 orang, dan tahun 2020 sebanyak 33 orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus sebanyak 35 orang. Sehingga total penyalahgunaan narkoba yang telah lapor diri sampai dengan bulan agustus 2021 sebanyak 158 orang.

c. Data Fasilitas Layanan Rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Fasilitas layanan rehabilitasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018 s.d tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Data Fasilitas Layanan Rehabilitasi

TAHUN	Fasilitas Rehabilitasi IP		Fasilitas Rehabilitasi KM	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2018	7	16	2	3
2019	10	18	3	3
2020	10	26	2	3

Sumber : LKIP BNN Kepulauan Bangka Belitung 2018-2020

d. Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

No	Nama Lapas	Jumlah
1	Lapas Kelas II A Pangkal Pinang	39 orang
2	Lapas Kelas II B Sungai Liat	148 orang
3	Lapas Kelas II B Tanjung Pandan	45 orang
4	Lapas Narkotika Kelas II A Pangkal Pinang	1.061 orang
5	Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Pangkal Pinang	68 orang
6	Lembaga Pembinaan Khusus anak Pangkal Pinang	4 orang
7	Rutan Kelas II B Muntok	33 orang
	Jumlah	1.398 orang

e. Data dan Informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah dan perguruan tinggi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi hasil pemekaran Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' BT dan 0°50' sampai 4°10' LS. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas 81.725,06 km². Letak geografis sebelah barat : selat Bangka dan wilayah provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur : selat karimata dan Pulau Kalimantan, sebelah Utara Negara Malaysia dan sebelah selatan : laut jawa. Luas wilayah daratan dan lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 km, luas daratan lebih kurang 16.424,06 km² atau 20,10% dari total wilayah dan luas lautan kurang lebih 65.301 km² atau 79,90% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang dengan jumlah kecamatan 47 dan 84 kelurahan dan 305 desa.

Memiliki 2 (dua) Bandara Nasional serta 8 (delapan) Pelabuhan Resmi dan ribuan jalur laut yaitu : Bandara Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Pulau Belitung serta Pelabuhan laut : Pelabuhan Pangkalan Balam, terletak di Pangkal Pinang, Pelabuhan Muntok berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu berada di bagian barat laut Pulau Bangka, Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Sadai di Bangka Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu wilayah kepulauan memiliki lebih kurang 490 pulau. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 50 pulau yang ditempati, sisanya sekitar 440 pulau tidak berpenghuni sehingga kondisi tersebut menjadi peluang besar sebagai tempat transit peredaran narkoba.

Pada Tahun 2020, penduduk Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan sebanyak 1.455.678 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 749.548 jiwa dan perempuan sebanyak 706.130 jiwa. Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5.469 Orang yang terdiri dari 2.907 pegawai laki-laki dan 2.562 pegawai perempuan. Jumlah Perguruan tinggi di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 19 Perguruan Tinggi Terdiri dari 2 (dua) Perguruan Tinggi Negeri dan 17 (tujuh belas) Perguruan Tinggi Swasta.

Adapun jumlah sekolah dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tabel berikut :

**JUMLAH JENJANG PENDIDIKAN
DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

JENJANG	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
TK	83	290	373
SD	760	62	822
SMP	161	57	218
SMA	44	25	69
SMK	36	22	58

**Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam angka
(Publikasi BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)**

- f. Data Sumber Daya Manusia BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka menjalankan keberlangsungan organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sumber daya manusia yang seharusnya dimiliki oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BNN Kab/Kota jajaran sesuai DSP adalah sebanyak 523 orang pegawai namun pegawai yang ada saat ini sebanyak 56 orang pegawai PNS dan Polri dengan dibantu oleh tenaga TTK sebanyak 79 orang pegawai. Komposisi pegawai BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BNN Kab/Kota jajaran dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

No	Nama Satker	Polri	ASN	TKK	Jumlah
1	BNNP Kep. Bangka Belitung	11 orang	15 orang	23 orang	49 orang
2	BNN Kota Pangkal Pinang	1 orang	7 orang	15 orang	23 orang
3	BNN Kab. Bangka	-	10 orang	16 orang	26 orang
4	BNN Kab. Bangka Selatan	-	5 orang	10 orang	15 orang
5	BNN Kab. Belitung	-	7 orang	15 orang	22 orang
Jumlah Total		12 orang	44 orang	79 orang	135 orang

- g. Data Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Sarana dan prasarana gedung kantor yang dimiliki oleh BNNP dan BNNKab/Kota masih banyak berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah yaitu BNN Kab. Bangka, BNN Kab. Bangka Selatan dan BNN Kab. Belitung. Posisi infrastruktur utamanya gedung kantor tidak hanya menyokong kinerja kelembagaan, namun juga mampu mewujudkan representatif BNN sebagai institusi yang menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana perkantoran BNNP dan BNKK Kab/Kota, berikut data kondisi existing ketersediaan gedung dan tanah BNNP dan BNNK :

Kondisi existing Tanah dan Gedung Kantor BNNP dan BNNK

Kondisi existing		Jenis kepemilikan
Satker	Jumlah	
BNNP Kep. Babel	1	Tanah dan Bangunan Milik BNN

BNN Kota Pangkal Pinang	1	Tanah dan Bangunan Milik BNN
BNN Kab. Bangka	1	Tanah dan Bangunan milik Pemda (pinjam pakai)
BNNK Kab. Bangka Selatan	1	Tanah dan Bangunan milik Pemda (pinjam pakai)
BNN Kab. Belitung	1	Tanah dan Bangunan milik Pemda (pinjam pakai)

Terkait dengan kondisi kebutuhan pembangunan, BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan kepada Pemda setempat untuk proses hibah tanah dan pembangunan gedung BNNK.

Sarana kendaraan yang dimiliki oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BNN Kab/Kota jajaran adalah sebagai berikut :

SATKER	JENIS KENDARAAN			KET
	KHUSUS	R4	R2	
BNNP KEP. BANGKA BELITUNG	3	6	4	(R4 pinjam pakai 2 unit)
BNN KOTA PANGKAL PINANG	1	2	4	
BNN KAB. BANGKA	1	1	4	
BNN KAB. BANGKA SELATAN	-	1	4	
BNN KAB. BELITUNG	1	2	2	

Peremajaan infrastruktur secara memadai merupakan bagian dari kinerja bagian umum dalam menopang kinerja core business BNN Provinsi lainnya. Kebutuhan seperti komputer, Laptop, printer, kamera, peralatan administrasi dan kelengkapannya, installment software serta perlengkapan jaringan akan mampu membantu kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lima tahun kedepan.

h. Sarana klinik BNNP dan BNNK.

Untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan klinik dan Lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan mengeluarkan Keputusan Kepala BNN Nomor :

KEP/196/II/DE/RH.03/2021/BNN tentang Penetapan Klinik dan Lembaga Rehabilitasi milik BNN Tahun 2021. Adapun daftar klinik tersebut tertuang dalam tabel dibawah ini :

**DAFTAR KLINIK DI BNNP DAN BNNK
DI KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA LEMBAGA	SATKER
1.	Klinik Pratama BNN Provinsi Kep. Bangka Belitung	BNN Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	Klinik Pratama BNN Kota Pangkal Pinang	BNN Kota Pangkal Pinang
3.	Klinik Pratama BNN Kab. Bangka	BNN Kab. Bangka
4.	Klinik Pratama BNN Kab. Bangka Selatan	BNN Kab. Bangka Selatan
5.	Klinik Pratama BNN Kab. Belitung	BNN Kab. Belitung

i. Senjata Api; dll

Untuk mendukung pemberantasan narkoba di BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BNN Kab/Kota jajaran dibekali dengan senjata api dengan jumlah 18 (delapan belas) pucuk terdiri dari pistol CZ P07 kadet sebanyak 4 (empat) Pucuk, scorpion sebanyak 7 (tujuh) HK P30 sebanyak 1 (satu) pucuk, SAIGA sebanyak 5 (lima) pucuk dan MP5 sebanyak 1 (satu) pucuk.

j. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya

Capaian kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian realisasi anggaran dan tercapainya output yang telah ditetapkan.

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
2018	5.038.918.000	4.083.152.502	81,03%
2019	4.442.967.000	4.146.512.925	93,33%
2020	4.375.545.000	3.999.572.794	91,41%

Tahun Anggaran	Target Output	Capaian Output	% Output
2018	805	808	100,37
2019	326	336	103,06
2020	76	75	98,68

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat dikelola dan dioptimalisasi.

Berbagai potensi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
- b. Menggerakkan potensi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, sehingga dapat menjadikan Kepulauan Bangka Belitung sebagai laboratorium bagi penelitian dan pengabdian bagi civitas akademika dan mahasiswa;
- c. Perspektif penanganan masalah kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak Stakeholder dan pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah :

a. Problematika pengawasan peredaran Narkoba

Lebih lanjut, isu strategi problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat;
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba di jalur-jalur tidak resmi (pelabuhan-pelabuhan tikus dan pulau-pulau tidak berpenghuni);

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran di sebabkan rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah, yang antara lain :

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba;
- 2) Daya Tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun resiko hukumnya yang sangat tinggi bahkan hukuman mati;
- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba;
- 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut;
- 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya manusia, anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalnya fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan

penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.
- 2) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
- 3) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assesment penyalahguna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
- 4) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.
- 5) Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah pariwisata yang tentunya kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Untuk meminimalisir hal tersebut maka salah satu upaya adalah potensi sumber daya manusia yang harus dimaksimalkan dengan menggandeng berbagai

pihak, baik Perguruan tinggi, stakeholder dan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Harapan kedepannya dapat mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara mandiri dan sukerala dalam melaksanakan Program P4GN di wilayahnya masing-masing.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020 2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba;

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan gelap Narkoba.

Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi cyber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengelolaan tata kelola psikotropika dan prekursor narkotika di sektor industri,

pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksi narkoba, penindakan dan penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

2. Peningkatan pemberdayaan, partisipasi kedayatanggapan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Kebijakan ini mencakup pengembangan metode pendidikan anti narkoba, pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan.

Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas adalah :

- a) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba khususnya pada kalangan generasi muda dan advokasi publik untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
 - b) Pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba.

Kebijakan ini mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas hidup penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba sehingga meminalisir

kemungkinan relaps. Cakupannya antara lain : pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut adalah :

- a) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi;
- b) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non Pemerintah.

4. Penguatan Jaringan Kerjasama Kelembagaan, Hukum, inovasi dan teknologi.

Kebijakan ini mencakup dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi supporting bagi kinerja core business dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah :

- a) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN;
- b) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi;
- c) Kolaborasi sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota dan perguruan tinggi;
- d) Penataan dan Penguatan kelembagaan untuki memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini mencakup peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 sebesar Rp.20.657.482.500 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), yang tersebar di 5 (lima) unit kerja BNN Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain

itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	N/A	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	N/A	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	N/A	3,2	3,2	3,2	3,2

5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	N/A	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	N/A	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	N/A	3,2	3,2	3,2	3,2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	N/A	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	N/A	10 Berkas	10 Berkas	10 Berkas	10 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-

9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	N/A	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	N/A	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	N/A	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	N/A	90	90	90	90
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	N/A	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	N/A	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	N/A	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	648.126.000	680.533.000	714.559.000	750.287.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	N/A	259.617.000	272.598.000	286.228.000	300.534.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori	N/A	1.138.374.000	1.195.293.000	1.255.058.000	1.317.811.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			"Mandiri" di Wilayah Provinsi					
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	N/A	147.575.000	154.954.000	162.702.000	170.837.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	272.170.000	285.779.000	300.068.000	315.071.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis					

6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	N/A	624.823.000	656.065.000	688.068.000	723.311.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	N/A	140.000.000	147.000.000	153.350.000	162.067.500

8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	N/A	671.877.000	705.471.000	740.745.000	777.782.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)					
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	N/A	189.355.000	198.823.000	208.764.000	219.203.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika					
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	N/A	-	-	-	-

11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	N/A	111.442.000	117.015.000	122.865.000	129.009.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target					
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	N/A	589.837.000	619.329.000	650.296.000	682.811.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target					

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Informasi dan Edukasi melalui Talkshow/Tatap Muka
				Informasi dan Edukasi melalui Kampanye/Pagelaran Seni
				Informasi dan Edukasi melalui Insert Konten
				Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Media Cetak
				Informasi dan Edukasi melalui Branding pada Sarana Publik
				Informasi dan Edukasi melalui Placement Radio Lokal/Daerah
				Informasi dan Edukasi melalui Media Online
				Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Informasi dan Edukasi melalui Talkshow/Tatap Muka
				Informasi dan Edukasi melalui Media Online
				Informasi dan Edukasi melalui Placement Radio Lokal/Daerah
				Dialog Interaktif Remaja

2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK
				Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi dalam rangka Pengayaan Refferensi Advokasi di BNNP
				Fasilitasi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa
	Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa			
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rapat Kerja Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022
				Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
				Rapat Kerja Program Pemberdayaan Anti Narkoba
				Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
				Workshop Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah
				Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine di Instansi Pemerintah
				Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
				Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

				Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
				Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
				Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
				Workshop Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta
				Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine di Lingkungan Swasta
				Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
				Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba bagi BUMN/BUMD dan Dunia Usaha/Lingkungan Swasta
				Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta
				Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di BUMN/BUMD dan Dunia Usaha/Lingkungan Swasta
				Workshop Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Masyarakat
				Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine di Lingkungan Masyarakat
				Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
				Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

				Workshop Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan
				Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urine di Lingkungan Pendidikan
				Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba bagi Lingkungan Pendidikan
				Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) 	<p>Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika</p> <p>Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang</p>	<p>Pemetaan Potensi pada Kawasan Rawan Narkoba Perkotaan/Pedesaan</p> <p>Rapat Kerja dalam rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder</p> <p>Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka Harmonisasi Program Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba</p> <p>Bimbingan Teknis Lifeskill bagi Masyarakat Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan</p> <p>Bimbingan Teknis dalam rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder</p> <p>Monitoring dan Evaluasi pada Kawasan Rawan Perkotaan atau Pedesaan</p> <p>-</p>

5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Bimbingan Teknis Petugas IBM	
			Agan Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Monitoring Rencana Aksi	
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	-	
				Peningkatan Kompetensi Teknis	Verifikasi Tempat Uji Kompetensi
			Uji Sertifikasi Koselor Adiksi		
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Rapat Kerja Bidang Rehabilitasi Tingkat Provinsi	
				Bimbingan Teknis Tingkat Provinsi	
				Bimbingan Teknis bagi Lembaga Rehabilitasi	
				Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	
		2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Operasional Klinik atau Fasilitas Rehabilitasi	
				Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	
				Pendampingan Pemulihan	
				Layanan SKHPN	
			-		
			-		
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Rapat Koordinasi IBM			
		Pemetaan			
Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan Unit IBM			
		Operasional Unit IBM			
		Supervisi dan Asistensi			
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pemetaan Informasi Jaringan Intelijen	

8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Rapat Kerja Direktorat Narkotika, BNNP dan BNNK dalam upaya Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
				Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Koordinasi Kegiatan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Pengeluaran Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Perawatan Kesehatan Pegawai
				Pengawasan Tahanan
				Layanan TAT
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja
				Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
				Koordinasi Penyusunan Laporan

12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Rekonsiliasi dan Penelahaan Data Keuangan
				Rekonsiliasi dan Penelahaan Data Keuangan Semester I
				Penyusunan Laporan PNBPN Semester I
				Penyusunan Laporan PNBPN Semester II
			Layanan Perkantoran	Administrasi Kegiatan
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAPA W
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA
				Penyampaian SPM ke KPPN